



KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DALAM GERAKAN POLITIK FORMALISASI ISLAM DI INDONESIA

Abd. Rahman

rahman@stainkepri.ac.id.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

***Abstrak:** Persoalan ideologi merupakan faktor yang penting memunculkan ekspresi politik berbentuk kekerasan dan teror. Apabila seseorang telah cukup kuat pemahaman yang merasuki pemikiran dan jiwanya, maka akan sulit untuk dilakukan perbaikan pola pikir. Apalagi bila pemahaman agamanya cukup sempit, yakni melihat agama hanya secara tekstual, maka hal ini berpotensi menjadi fanatisme agama yang nantinya bisa mengarah pada tuntutan formalisasi agama dan bentuk ekspresi politiknya berupa kekerasan dan teror. Kenyataan demikian ini tentu sangat merugikan bagi kehidupan rakyat karena hanya akan menimbulkan gejolak yang tiada berakhir. Dakwah-dakwah yang lebih menekankan tentang 'Islam versi Arab' harus segera direduksi agar tidak menjadi pemicu timbulnya fundamentalisme dan radikalisme.*

***Kata Kunci:** Ideologi, ekspresi politik, fanatisme agama*

A. PENDAHULUAN

Berbagai bentuk ekspresi politik bisa dilakukan oleh setiap orang, mulai dari sikap menyayangi, membenci, dan bahkan teror. Biasanya, ekspresi tersebut sebagai bentuk perjuangan atas kepentingan politik yang diperjuangkannya. Selain itu, ekspresi itu bergantung dengan seberapa kuat nilai-nilai ideologis politik tertanam dalam pemahamannya. Semakin kuat nilai ideologis dan kepentingan yang hendak dicapai, maka ekspresi politiknya semakin ekstrim, sebab tujuan dari tindakan politiknya ialah mencapai cita-cita tanpa kenal kompromi dengan tujuan politik orang lain. Pemaksaan kepentingan dan ideologi inilah yang kerap kali menghadirkan teror dan kekerasan dalam tindakan politik.

Beberapa tindak kekerasan politik itu bisa saja didasarkan

sebagai bagian dari eksploitasi dan bisa juga sebagai bagian dari *pressure* agar eksistensi kepentingan dan ideologi bisa terakomodir. Di Indonesia, praktik kekerasan sebagai tindakan dan ekspresi politik telah menjadi bagian lumrah. Misalnya saja dukungan kepada salah satu calonnya yang tidak berhasil meraih kekuasaan dengan aksi anarkisme dan mengganggu ketertiban umum serta bentrok dengan kelompok pendukung lawan politik lainnya. Kekerasan kelompok yang memperjuangkan tentang hak politik mereka yang berlawanan dengan nasionalisme disebut dengan sparatis, sedangkan kekerasan kelompok yang melawan nasionalisme atas nilai agama disebut dengan radikalisme.

Artinya, semua elemen bisa saja mengekspresikan tindakan politiknya dengan perasaan apabila

tujuan-tujuan politiknya belum tercapai, apalagi bila hal itu dikaitkan dengan keyakinan ideologis dari pemahaman agama secara radikal. Beberapa kelompok demikian itu terus ada dalam sepanjang sejarah Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Tauhidwal Jihad, Forum Aktivis Syariah Islam, Pendukung dan Pembela Daulah, Laskar Jundullah, dan yang terakhir ialah kelompok yang berafiliasi dengan *Islamist State Iraq and Suria* (ISIS) atau yang sekarang berganti nama dengan *Daulah Islamiyah* atau *Islamist State* saja.

Kelompok yang berafiliasi pada ISIS ini telah melakukan aksi teror terbaru di Indonesia pada 14 Januari 2016 lalu. Peristiwa yang cukup menghebohkan ialah aksi bunuh diri dan terorisme yang terjadi di Jl. Tamrin Jakarta. Sebanyak tujuh orang tewas, yakni empat orang teroris dan tiga orang warga sipil. Aksi itu cukup menghebohkan karena dilakukan di tempat terbuka dengan sasaran pertama Starbucks dan pos polisi. Dari keterangan polisi, aksi itu terkait dengan ISIS. Aksi mereka itu tak lain bagian dari upaya menunjukkan eksistensi diri yang butuh pengakuan secara politik. Kelompok ini menyakini ajaran Islam mewajibkan pendirian negara Islam untuk menerapkan syari'at yang disebut dengan negara Islam (*daulah islamiyah*). Mereka melakukan berbagai tindakan dalam upaya mewujudkan ide tersebut, walau dengan cara melakukan

tindakan kekerasan demi wujudkan cita-cita politiknya.

Praktik mewujudkan negara Islam juga pernah terjadi di Indonesia, yakni sebuah perlawanan atau pemberontakan kelompok Kartosuwiryo yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia (Asymawi dan Widyawati, 2004). Meski aksi mereka telah berhasil ditumpas, namun ajaran dan cita-citanya masih terus mengalir pada beberapa generasi setelahnya, termasuk kelompok Jamaah Islamiyah Indonesia (JII) yang kemudian melancarkan aksi bom Bali dan beberapa aksi bom bunuh diri setelahnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ideologi agama telah mempengaruhi para pendukungnya dengan kuat sehingga berani mengekspresikan tindakan politiknya dengan kekerasan dan aksi terorisme. Memang kajian agama dan politik selalu saja menarik perhatian para teoritis. Sepanjang sejarah politik, agama ataupun keyakinan seringkali menjadi landasan moral politik, tetapi pemahaman agama yang cukup dominan justru menjadi sarana untuk ke arah politik kekuasaan. Hal ini pernah terjadi pada di Eropa, dimana dominasi gereja begitu kuat dalam masalah politik suatu kerajaan. Bahkan pengakuan kekuasaan seorang raja bererti ketika gereja merestunya. Sedangkan dalam sejarah politik Islam, pun demikian bahwa dengan mencari pembenaran atas kekuasaannya melalui dalil-dalil agama. Kenyataan ini (politisasi agama) membuat agama menjelma menjadi "pembenar" kekerasan.



Agama semestinya tidak menimbulkan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa agama dapat menimbulkan kekerasan apabila berhubungan dengan politik sebab agama dapat disalah gunakan dan disalaharahkan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Menurut M. Tohir (2012), dari sisi eksternal, agama profetik (kenabian) seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitasnya terancam. Dari sisi internal, agama profetik cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasarkan kehendak Tuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman agama merupakan salah satu alasan yang mendasari kekerasan politik agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam makalah ini penulis hendak menjawab tentang apa saja yang menjadi dasar penyebab kekerasan dalam ekspresi islam politik? Pertanyaan ini merupakan hal penting untuk mengetahui lebih dalam tentang pemahaman atau tafsir keagamaan ada pada gerakan radikal Islam yang menjadi gerakan islam politik. Tentu untuk menjawab pertanyaan itu juga perlu dihadirkan tentang sejarah gerakan radikal Islam yang pernah ada di Indonesia. Maka dari pertanyaan tersebut nantinya akan dilihat dari perspektif nomatif tentang dogma-dogma agama.

A. RELASI ISLAM DAN POLITIK

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran untuk semua dimensi kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan antar manusia, manusia dan makhluk hidup

lainnya, dan lebih-lebih lagi tentang hubungan manusia dan Tuhannya. Sumber ajarannya ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan rujukan utama bagi umat Islam dalam menjalankan segala bentuk panduan kehidupan yang islami. Artinya, Islam memiliki norma yang menjadi acuan dalam kehidupan. Hal inilah yang menjadikan Islam sebagai ideologi bagi umatnya (Haryatmoko, dan Schillebeeckx, 2007).

Ideologi Islam adalah ideologi yang bersumber dan berorientasi kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena istilah Islam ideologis seringkali sebangun dan semakna dengan istilah 'Islam politik' dan 'Islamisme', maka Islam politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan kitab capaian politiknya. Islam menjadi penyamangat dalam menggapai kehidupan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.

Orientasi kehidupan nan Islami bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan. H.A.R Gibb (1970), menilai bahwa Islam bukanlah hanya persoalan teologi semata melainkan juga berkaitan dengan sistem peradaban yang komplet. Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat sebab Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan. Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan

persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami (Rais, 1987).

Menurut Ibnu Taimiyah, organisasi politik bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting, tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh. Artinya, keberadaan negara merupakan suatu keniscayaan demim membangun kemashlatan bagi umat manusia. Negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi. Artinya, apapun bentuk negaranya yang dihuni oleh umat Islam, maka nilai-nilai dari konstitusinya harus berlandaskan pada nilai-nilai universal Islam itu sendiri (Ma'arif, 1985).

Aturan perundang-undangan tidak boleh menzalimi rakyat, dan perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Prinsip ini diyakini benar oleh umat Islam sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar akan dapat diterapkan dengan baik. Tidak

sedikit yang memandang bahwa sejak awal Islam merupakan agama politis (Effendy, 1994). Namun, pada perkembangannya, terjadi berbagai macam pemahaman tentang bagaimana relasi Islam dan negara. Setidaknya ada tiga paham tentang relasi Islam dan negara, yakni paham integralisme, sekularisme, dan simbiosis-mutualisme (Azra, 1996, Syamsudin, 2001 dan Bustam-Ahmat, 2001).

Paham integralisme menilai bahwa antara agama dan agama tidaklah terpisahkan satu sama lain. Wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara sehingga pemerintahan diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Hal ini dipraktik oleh beberapa negara di Timur Tengan seperti Saudi Arabia, Republik Islam Iran, Pakistan, bahkan juga seperti Malaysia. Negara yang demikian menjadikan syari'at Islam sebagai landasan bagi konstitusi dan peraturan perundang-undangannya.

Adapun paham sekularisme menganut pemahaman bahwa antara agama dan negara harus dipisah sebab keduanya tidak memiliki keterkaitan. Kelompok sekularis menilai bahwa agama merupakan urusan individu dan tidak boleh ada campur tangan dari negara, begitu juga agama tidak boleh merasuki ranah negara. Negara dengan penduduk Islam yang cukup terlihat dengan paham ini ialah Turki. Turki tidak mendajikan syariat Islam sebagai landasan konstitusi dan perundang-undangan di negara tersebut. Tokoh yang cukup terkenal dengan pemikiran sekuler ini ialah Ali Abdu ar-Raziq. Menurutnya, Islam tidak mewajibkan umatnya



untuk mendirikan negara Islam karena tidak pernah ada nash, sedangkan praktik yang dilakukan Nabi di Madinah bukanlah bagian dari syariat Islam melainkan memang suatu kebutuhan sesuai dengan konteks kala itu (Abd ar-Raziq, 1925).

Sedangkan paham simbiosis-mutualisme menilai bahwa agama dan negara saling berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Negara sebagai penunjang bagi tujuan agama, sedangkan agama menjadi panduan etika dan moralitas bagi negara. Hal ini seperti dilakukan di Mesir, Irak, Yaman, dan termasuk juga Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemeluk Islam merupakan kalangan mayoritas, namun tidak lantas menjadikan Islam sebagai ideologi politik negara (Ma'arif, 1996).

Di kalangan teoritis dikenal tiga paham dalam kajian relasi Islam dan negara, maka hal ini memunculkan perbedaan tentang penerimaan terhadap demokratis sebagai sistem negara. Dalam menanggapi hal ini, para pemikir Islam juga terbagi ke dalam tiga kelompok yang pro, kontra, dan kelompok non blok (Thaha, 2005 & assyaukani, 2011). Kelompok kontra menolak adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi sebab menurut mereka, mengakui kedaulatan rakyat sama dengan mengingkari kedaulatan tuhan. Sedang kelompok 'blok pro' menilai substansi demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam sebab memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Lain halnya dengan kelompok 'non blok' yang berusaha berdiri di tengah-tengah dari keduanya dengan

mengemukakan adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam Islam dan demokrasi.

Perbedaan pandangan tentang relasi Islam dan negara ini memberikan implikasi tersendiri bagi ekspresi politik dari setiap pendukung pemahaman tersebut. Sejarah perbedaan pandangan ini mencuat ketika penggulingan khalifah Ustmaniyah yang beribu kota di Damaskus. Kala itu, kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah telah menjadi daerah koloni kerajaan Eropa yang melakukan ekspansi lebih tepatnya imperialisasi ke daerah Timur Tengah dan Timur jauh, termasuk ke Indonesia. Dengan kondisi yang demikian itu membuat Turki selaku pengayom kerajaan-kerajaan Islam di dunia tidak berdaya dengan berbagai gempuran Barat. Bahkan negara-negara kecil yang masih berada dalam wilayahnya tidak berdaya untuk diselamatkannya. Kondisi itu membuat imperium Turki Ustmani tak kuasa lagi sehingga gejolak politik dalam negerinya pun tidak mampu ditangani dengan baik, apalagi membantu kerajaan-kerajaan lain di bawahnya.

Di saat yang bersamaan, kebangkitan terhadap pemikiran Islam juga sudah didengungkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Keduanya mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan ajaran Islam dengan menggali kembali khazanah keilmuan Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis sebagai respon kekinian terhadap perkembangan peradaban manusia. Misalnya, Abduh menilai bahwa keterbelakangan yang dialami umat

Islam karena adanya kejumud dan dalam berpikir sehingga menganggap Islam itu hanya terkait dengan aktivitas ibadah saja, padahal yang tidak kalah penting ialah tentang bagaimana kehidupan umat Islam terus melangkah maju. Sebab itulah keduanya mencoba untuk melakukan kajian keislaman yang moderat.

Sedangkan di pihak lain, langkah puritanisme juga cukup menguat di kalangan ulama di Saudi Arabia. Mereka yang dikenal dengan kalangan *salafy* ini mengajak agar masyarakat melakukan pemurnian ajaran Islam dengan kembali menjalani kehidupan layaknya di era Nabi Muhammad SAW. (Qodir, 2015). Kalangan ini menolak praktik-praktik yang dinilai tidak diajarkan langsung oleh agama seperti ziarah kubur. Kalangan ini juga bisa dengan mudah mengecap “kafir” kepada orang yang dinilai melakukan perbuatan-perbuatan ‘bid’ah’. Bagi mereka, syariat Islam haruslah menjadi hukum formal suatu negara. Dari sini pula, akar tentang fundamentalisme era modern ini bermula. Bahkan, tidak sedikit penelitian yang menyebutkan tentang pokok ajaran mereka memberikan kontribusi bagi radikalisme masa kini.

B. ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

Perdebatan tentang Islam sebagai ideologi negara di Indonesia telah bermula sejak awal negara ini berdiri. Kalangan islamis menginginkan ideologi negara Indonesia adalah Islam dengan syariat Islam sebagai sumber hukum yang digunakan, sedangkan kalangan nasionalis menilai bahwa Islam tidak

cocok menjadi ideologi Indonesia karena penduduk Indonesia tidak semua melek Islam dan Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Namun, dari kelompok Islam sedang menunjukkan kekuatannya dengan dukungan yang banyak. Perdebatan ini berawal dari perjuangan kelompok Islamis dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Satu klausul dalam Piagam Jakarta itu berbunyi “menjalankan syariat Islam” yang menjadi perdebatan panjang.

Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Majelis yang merumuskan dasar negara ini mengalami perdebatan yang lebih panjang lagi karena kalangan Islamis menginginkan pasal tentang penerapan syari’at Islam kembali dimasukkan dalam dasar negara. Tetapi hal ini mendapatkan pertentangan dari kalangan nasionalis. Bahkan kekuatan partai politik yang berbasis massa Islam pun lebih banyak memilih paham nasionalis dari pada Islamis. Dalam perdebatan panjang itu, akhirnya muncullah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya, gerakan-gerakan Islam politik juga tidak redup dengan sendiri sehingga pemerintah menerapkan apa yang disebut oleh Syafi’i Ma’arif dengan teori belah bambu, yakni menekan orang tidak mendukung pemerintahan dan mengangkat atau memberikan kemudahan bagi para pendukung pemerintah.



Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai diskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini. Di bawah rezim Orde Baru, polemik tentang ideologi Islam ini semakin meredup dan kehilangan perannya. Bahkan, pemerintah mengambil kebijakan tegas dengan secara perlahan untuk ‘membungkam’ keinginan-keinginan kalangan Islamis dalam gerakan-gerakan politik. Hal ini mencapai puncaknya pada era 1970-an dimana muncul slogan “Islam Yes, Partai Islam No” yang dikumandangkan oleh Nurcholis Majid. Sejak itu, kalangan Islamis tidak lagi mendapatkan panggung politik dan lebih banyak kembali ke ranah pendidikan (Effendy dan Nugroho, 2003).

Pasca reformasi bergulir, ketika rezim Orde Baru tidak lagi memiliki andil otoriter terhadap kebijakan negara, maka perdebatan tentang ideologi Islam kembali mencuat. Hal ini terlihat dalam amendeman Undang-Undang Dasar 1945 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipimpin oleh Amien Rais. Kala itu, golongan Islam kembali memunculkan perlunya penerapan syari’at Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja, ide ini muncul karena euforia kebebasan berpendapat dan adanya panggung bagi kalangan Islamis untuk memperjuangkan kembali ideologi Islam. Bahkan, tuntutan tersebut hingga saat ini masih menguat pasca keinginan penerapan syari’at Islam tidak terakomodir dalam konstitusi,

bahkan bentuknya melalui ekspresi politik dengan kekerasan.

Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa gerakan Islam tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menginginkan berdirinya *darul Islam* ataupun *daulah Islamiyah* dan kelompok yang menginginkan penerapan *syari’at Islam* melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Turmudi, 2005). Meski demikian, keduanya kerap diidentifikasi sebagai kelompok formalisasi syariah. Bahkan, tindakan atau ekspresi politik dari kelompok ini mengarah pada kekerasan dan terorisme.

C. RADIKALISME KONTRA NASIONALISME DI INDONESIA

Hingga saat ini, diskursus Islam dan negara terus menjadi perbincangan menarik dan bahkan masing-masing mengalami penguatan gerakan yang sering disebut dengan Islam politik. Islam politik memang kerap dilebelkan kepada gerakan politik dari kalangan umat Islam, khususnya menuntut agar setiap negara menerapkan paham integralistik. Kalangan ini terus mengumandangkan pemahamannya dengan berbagai kegiatan guna mendapatkan dukungan dan penguatan dari kalangan umat Islam sehingga disebut juga gerakannya disebut gerakan fundamentalisme. Tetapi ekspresi politik kalangan ini kerap kali memunculkan sikap radikalisme yang mengarah pada kekerasan dan teror. Hal inilah menjadi perhatian dalam makalah ini sebab gerakan politik yang dilakukan kalangan

fundamentalisme radikal cukup memberikan kesan negatif kepada Islam itu sendiri. Karena, dengung tentang Islam yang mengajarkan tentang perdamaian dan penuh toleran terhadap manusia seakan runtuh oleh ekspresi politik mereka.

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme menurut Horace M.Kallen sebagaimana dikutip oleh Tarmizi Taher (Taher, 2005). Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kalangan radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Sesuai dengan arti kata 'radic', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar sehingga semangat untuk melakukan perubahan dilakukan meski dengan cara kekerasan.

Ketiga adalah kuatnya keyakinan kalangan radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafian kebenaran sistem lain yang

akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatas namakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal. Dalam catatan sejarah radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi.

Jejak pertama radikalisme dalam gerakan politik Islam di Indonesia yang kontra nasionalisme ialah pemberontakan yang dipimpin Kartosuwirjo pada 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII) yang bermula dari Jawa Barat. Kelompok ini semakin mendapatkan tempat dan menyebar luas ke beberapa daerah lain, bahkan kelompok dari Aceh dan Makassar juga mendukung gerakan tersebut. Mereka memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan menolak keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI. Akibatnya, seringkali kelompok ini berlawanan atau berhadap-hadapan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas mempertahankan negara. Bagi TNI, apa yang dilakukan oleh kelompok pendukung Kartosuwiryo ini merupakan ancaman bagi nasionalisme bangsa Indonesia sehingga kelompok ini dipukul mundur oleh TNI.

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada



1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978 (Mubarak, 2008).

Aksi kelompok radikal ini menysar tempat-tempat ibadah umat non muslim yang ada di Indonesia yang membuat keresakan di masyarakat. Tentu saja, aksi demikian itu juga bertentangan dengan nasionalisme Indonesia yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Peristiwa itu juga menjadi perhatian serius pemerintah Orde Baru karena telah menimbulkan ketidak tenangan masyarakat. Dugaan kuat hadirnya kelompok ini karena tekanan pemerintah yang mulai melakukan reduksi terhadap gerakan Islam dan “membungkam” para tokoh Islam agar tidak menyuarakan kembali ideologi Islam serta tidak “menggangu” program pemerintah.

Sejak saat itu, tidak ada aksi radikal cukup signifikan kecuali hanyalah ekspresi politik kalangan umat Islam hanya menjelang pemilu saja. Suasana itu mampu dipertahankan oleh Soeharto hingga pertengahan 1990-an. Gejala yang ada bukan lagi perihal tentang ideologi Islam, melainkan tentang tuntutan terhadap transparansi pemerintahan, penegakan hukum, dan antikorupsi. Gerakan Islam politik tertekan ke bawah sehingga tidak muncul kepermukaan, bahkan para tokohnya yang melakukan perlawanan akan mudah untuk diciduk dengan berbagai alasan. Satu-satunya ekspresi politik yang bisa disalurkan ialah turut bergabung pada partai politik Islam yang kala itu diwakili oleh Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) sehingga tidak terlalu mengancam nasionalisme.

Selanjutnya, pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikalisme kontra nasionalisme teridentifikasi sejak aksi bom bunuh diri di Bali pertama. Rentenan aksi-aksi serupa terus berlanjut dan bahkan hingga hari ini (Qodir, 2015).

Amrozi Cs dari kelompok pelaku bom Bali merupakan jaringan baru yang bernama Jamaah Islamiyah (JI) dari semangat yang lama seperti yang diharapkan dengan pendirian NII. Dalam hal ini JI memiliki banyak afiliasi dengan beberapa organisasi yang senafas lainnya ketika itu. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir, tokoh yang paling bersikeras dengan pendirian untuk mendirikan negara Islam juga termasuk di dalamnya. Sebagian organisasi yang turut dalam konflik Poso dan Ambon juga berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah.

Sejak peristiwa bom Bali pertama, rentetan kasus aksi bom bunuh diri terus terjadi, seperti JW Marriot dan beberapa keduataan besar negara asing di Jakarta dan bahkan terjadi pula kasus bom Bali untuk kedua kalinya. Sasaran dan orientasi mereka ialah aset dan warga asing yang ada di Indonesia, khususnya Amerika Serikat. Hal itu sebagai respon mereka terhadap penangkapan-penangkapan Amerika Serikat kepada beberapa orang yang diduga terlibat terorisme di seluruh dunia dan kaitannya dengan serang ke gedung kembang World Trade Centre (WTC). Sejak itulah komando jihad atau perang melawan orang kafir dikumandangkan lebih keras lagi. Maka, aksi bom bunuh diri serupa itu juga dinilai sebagai jihad.

Apabila diperhatikan, gerakan radikalisme Islam tidak lagi bersifat lokal, melainkan juga telah memiliki koneksitas dengan gerakan-gerakan serupa dari negara lain. Adapun aksi yang dilakukan kelompok JI Indonesia ini merupakan hasil didikan *Jamaah Islamiyah* di Afghanistan (Turmudi, 2005). Semangat yang mereka kobarkan sama, yakni melawan hegemoni Amerika Serikat dan mendirikan negara Islam—bukan *khalifah islamiyah*. Aksi dari kelompok ini mereda ketika ahli perakit bom Dr. Azhari dan Nurdin M Top berhasil dilumpukan polisi di Malang. Selang waktu yang lama Indonesia aman dari aksi bom bunuh diri dari kelompok JI ini.

Upaya doktrinasi JI dengan aksi bom bunuh diri tidak berhenti begitu saja. Rentetan kasus bom bunuh diri pun masih terjadi di Indonesia dengan sasaran berbeda. Namun, kelompok teroris ini mulai mengarahkan serangan ke kepolisian dan dengan target yang tidak lagi jelas, seperti aksi bom bunuh diri di Masjid Mapolres Cirebon. Para pelaku selanjutnya bukan lagi dari jaringan JI tetapi mereka adalah orang yang pernah mendapatkan doktrin dari kelompok JI dan atau organisasi yang serupa. Sejak itu, target serangan bom berupab dan bukan lagi menasar asing. Mereka menilai hal itu sebagai jihad dengan ganjaran surga. Sedangkan Indonesia bukanlah negara Islam yang sehingga layak menjadi medan jihad untuk merebut dan mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi Islam.

Kasus aksi terorisme yang terakhir hingga saat ini ialah aksi

bom bunuh diri di Jl. MH Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016 lalu. Aksi ini diduga kuat terkait dengan *Islamic State of Irak and Suria* (ISIS). Kelompok ini menginginkan agar penegakan khalifah Islamiyah di Indonesia dengan berbaiat kepada pemimpin mereka di Irak. Aksi mereka ini dilakukan setelah ISIS terdesak dengan keadaan sehingga mereka mencari panggung. Yang tidak kalah menarik, simpatisan ISIS ini terbilang cukup banyak dan bahkan ada sekitar 500-an orang WNI yang ditengarai bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia.

Artinya, ide-ide tentang *khifalah islamiyah*, *daulah islamiyah* ataupun *darul islam*, dan penerapan syariah masih mendapatkan respon dan tempat di kalangan masyarakat Indonesia. Tentu hal ini menjadi fenomena menarik karena Indonesia merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia. Jaringan mereka tidak lagi hanya di Indonesia melainkan sudah memiliki jaringan internasional. Hal ini tidak lepas dari penanan internet dan kecanggihan bidang telekomunikasi. Kebanyakan dari mereka juga merupakan kalangan yang memiliki pemahaman agama secara hitam-putih dan berpandangan politik integralistik. Pola demikian memang sangat identik dengan pola ajaran yang dikembangkan oleh gerakan purifikasi yang kerap kali disebut dengan aliran salafi.

Pemahaman-pemahaman sebagaimana digambarkan di atas masih tumbuh pesat di kalangan masyarakat sehingga tuntutan terhadap ideologisasi Islam masih akan sangat kuat. Sebab, akar



pemahaman telah ditanamkan melalui gerakan dakwah dan ekspresi politiknya bisa berubah menjadi radikal: kekerasan dan teror. Menurut Shofwan Karim (2017) seringkali dakwah menjadi bingkai dari tumbuhnya gerakan politik Islam dan juga gerakan radikalisme dalam Islam di Indonesia. Sedangkan Zuly Qodir menilai, purifikasi menjadi cikal bakal tumbuhnya gerakan Islam politik dan mengarah pada radikalisme. Meskipun kelompok-kelompok yang mengajarkan purifikasi itu bukan organisasi politik, tetapi sebenarnya mereka juga telah berpolitik (Qodir, 2015). Gerakan politik Islam juga semakin menguat ketika momentum pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Isu-isu yang berhubungan dengan norma dan gerakan Islam sering diusung oleh politisi untuk merebut suara dari rakyat. Akibatnya, gesekan-gesekan antara pro dan kontra terhadap isu itu semakin menguat hingga pemilu selesai.

Gerakan politik untuk pendirian negara Islam di Indonesia sangatlah kontra dengan semangat nasionalisme yang telah susah payah dibangun sejak bangsa ini masih dijajah oleh bangsa Eropa. Karena itu, gerakan radikalisme masih menjadi acuan nyata bagi nasionalisme sebab mereka mengusung semangat keagamaan yang secara psikologis lebih mudah memicu fanatisme bagi pemeluknya.

D. Penutup: Deradikalisasi

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa persoalan ideologi merupakan faktor yang penting

memunculkan ekspresi politik berbentuk kekerasan dan teror. Apabila seseorang telah cukup kuat pemahaman yang merasuki pemikiran dan jiwanya, maka akan sulit untuk dilakukan perbaikan pola pikir. Apalagi bila pemahaman agamanya cukup sempit, yakni melihat agama hanya secara tekstual, maka hal ini berpotensi menjadi fanatisme agama yang nantinya bisa mengarah pada tuntutan formalisasi agama dan bentuk ekspresi politiknya berupa kekerasan dan teror. Kenyataan demikian ini tentu sangat merugikan bagi kehidupan rakyat karena hanya akan menimbulkan gejolak yang tiada berakhir. Dakwah-dakwah yang lebih menekankan tentang 'Islam versi Arab' harus segera direduksi agar tidak menjadi pemicu timbulnya fundamentalisme dan radikalisme.

Sebab itu, perlu diupayakan gerakan deradikalisasi agar pemahaman mereka tidak lagi sempit. Sebab, banyak kelompok-kelompok pengajian atau dakwah mengaku tidak berpolitik tetapi memiliki ambisi politik mendirikan negara Islam. Artinya, pada dasarnya mereka berpolitik tetapi tidak mendirikan partai politik sebagai wadah memperjuangkan ide dan ideologi mereka. Karena itu, negara harus berperan menutup celah bagi timbulnya radikalisme, baik itu dengan penguatan pemahaman tentang keagamaan yang lebih Indonesia, baik berupa penyejahteraan ekonomi, dan serta keamanan dan ketertiban sosial sehingga rakyat tidak memiliki kesempatan untuk berpikir fanatisme dan bertindak radikal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Abd ar-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Kairo: Syirkah Mahammiyah Mishriyah, 1925.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara CitadanFakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamental, Modernis, hingga Postmodernis*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadia, 1994.
- Din Syamsudin, *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, Jakarta: Mizan, 2005.
- Kamaruzzaman Bustam-Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Luthfi assyaukani, *Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muhammad Said al-Asymawi, *Menentang Islam Politik*, terj. Widyawati, Bandung: Alifya, 2004.
- Tarmizi Taher, et. all, *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM IAIN, 2005.
- Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*, Yogyakarta: Padma, 2003.
- Wim Beuken, at.al., *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- _____, *Islam Syariah vis a vis Negara: Ideologi Gerakan Politik Islam di Indoensia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Karim, S. (2015). Radikalisme, Islam Transnasional dan Dinamika Politik Bingkai Ukhuwah. *TAJDID : Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18(1), 95-107. Retrieved from [http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=TJD&page=article&op=view&path\[\]=94](http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=TJD&page=article&op=view&path[]=94)
- M. Tohir, (2012), Islam dan Gerakan Fundamentalism, *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13 (1), Samarinda. 47 – 61